

REFORMASI HUKUM PEMILU: MENINGKATKAN INTEGRITAS, PARTISIPASI, DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES DEMOKRASI

Abdul Bari², Achmad Taufik², Win Yuli Wardani³, Agustri Purwandi⁴, Ria Kasanova⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Madura

Email: ¹abdulbari.unira@gmail.com

²achmad.taufik@unira.ac.id

³winyuli@unira.ac.id

⁴a3purwandi@gmail.com

⁵kasanovaria@unira.ac.id

Abstrak:

Pemilu adalah komponen fundamental dari sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Proses pemilu sering kali menghadapi tantangan substansial terkait integritas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Abstrak ini menggali penemuan-penemuan penting mengenai masalah-masalah tersebut dan inisiatif-inisiatif untuk mereformasi undang-undang pemilu. Analisis kami menunjukkan bahwa masalah integritas pemilu mencakup kegiatan yang tidak etis, manipulasi hasil, dan intimidasi terhadap pemilih. Selain itu, keterlibatan politik yang rendah dan ketidakjelasan hukum juga merupakan masalah yang signifikan. Banyak negara telah menerapkan reformasi hukum pemilu untuk mengatasi masalah-masalah ini. Meningkatkan struktur pengawasan pemilu, memperbaiki peraturan pendanaan pemilu, dan memodernisasi teknologi pemilu telah memberikan dampak positif terhadap integritas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam proses pemilu. Temuan-temuan ini memiliki implikasi penting untuk meningkatkan demokrasi dan menegakkan kepercayaan publik. Mereformasi undang-undang pemilu sangat penting untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap tuntutan publik. Negara-negara harus memprioritaskan perubahan undang-undang pemilu sebagai komponen penting untuk meningkatkan lembaga-lembaga politik agar lebih selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Reformasi Hukum, Integritas, Partisipasi, Kepastian Hukum, Demokrasi*

Abstract:

Elections are a fundamental component of democratic systems that allow citizens to participate in the political process. Electoral processes often face substantial challenges related to integrity, participation and compliance with the rule of law. This abstract explores key findings on these issues and initiatives to reform electoral laws. Our analysis shows that electoral integrity problems include unethical activities, manipulation of results and intimidation of voters. In addition, low political engagement and legal opacity are also significant problems. Many countries have implemented electoral law reforms to address these issues. Improving electoral oversight structures, updating electoral financing regulations and modernizing election technology have had a positive impact on the integrity, participation and rule of law in electoral processes. These findings have important implications for improving democracy and upholding public trust. Reforming electoral laws is critical to improving the relationship between government and citizens, promoting transparency, accountability and responsiveness to public demands. Countries should prioritize electoral law change as a critical component of improving political institutions to better align with the needs and desires of society.

Keywords: *General Elections, Law Reform, Integrity, Participation, Legal Certainty, Democracy*

Pendahuluan

Sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan mengambil bagian dalam proses politik, didasarkan pada pemilihan umum¹. Pemilu memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mengontrol pemerintah dan membentuk kebijakan publik; pemilu merupakan contoh konkret dari kedaulatan rakyat². Sejak munculnya gagasan demokrasi modern, pemilihan umum telah menjadi alat yang sangat penting untuk menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab dan representatif³. Dalam pemerintahan yang demokratis, rakyatlah yang memegang kekuasaan, yang dijalankan oleh para pejabat terpilih⁴. Para pemilih memiliki hak untuk menyuarakan pendapat politik mereka dan menuntut agar wakil-wakil yang mewakili kepentingan mereka duduk dalam pemerintahan⁵.

Integritas pemilu, partisipasi, dan supremasi hukum semuanya beresiko karena berbagai masalah yang sering berkembang selama prosesnya, meskipun semua orang setuju bahwa pemilu itu penting⁶. Korupsi, manipulasi pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya adalah beberapa masalah yang mengganggu pemilu modern dan dapat membahayakan legitimasinya⁷. Berbagai tindakan, seperti manipulasi suara dan intimidasi, berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap proses politik.

Ketidakpastian hukum juga merupakan masalah serius dalam proses pemilu. Terkait dengan peraturan pemilu, interpretasi yang tidak konsisten dan prosedur pemungutan suara yang tidak jelas, ketidakpastian hukum dapat mengganggu proses pemilu dan menyebabkan perselisihan⁸. Kurangnya kepastian hukum juga dapat menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap keadilan dan integritas proses pemilu⁹. Mereformasi undang-undang pemilu sangat penting untuk menjaga integritas lembaga-lembaga politik dan memperkuat fondasi demokrasi dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut¹⁰. Dengan meningkatkan integritas proses pemilu, meningkatkan partisipasi, dan menegakkan norma-norma hukum,

¹ A Mufidah and A Syarofi, "HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)," ... *Republic: Journal of Constitutional Law*, 2024, <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HTN/article/view/868>.

² A Yusuf and H Hertanto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024," *Journal Publicuho*, 2023, <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/53341>.

³ A Habibi, "Pembatasan Peserta Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum," ... : *Indonesian Constitutional Law Journal* (scholar.archive.org, 2020), <https://scholar.archive.org/work/57hjoosrfvdwzjvcizhbec4qu/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/download/14549/pdf>.

⁴ L Purba, M Selan, and I Mubarak, "Eksistensi Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) Masyarakat Menyikapi Pemilu 2024," *Decisio: Law Journal*, 2024, <https://jurnalppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/article/view/7>.

⁵ N Yarsina and I Irhamni, "EKSISTENSI FUNGSI DAN PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Ensiklopedia of Journal*, 2024, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2187>.

⁶ J Saragih et al., "Demokrasi Patronase Dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pilkada Sumut Oleh Mahasiswa PPKN Unimed," ... *Governance Journal*, 2024, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1231>.

⁷ A Pabbu and I Irpan, "Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Palopo," *Alauddin Law Development Journal*, 2021, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/24053>.

⁸ O M Kasih and I Triadi, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia:(Enforcement of Human Rights in Public Political ...," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2024, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2369>.

⁹ P Patawari and I Bidja, "Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara," *Kalabbirang Law Journal*, 2019, <https://sainsmat.org/index.php/kalabbirang/article/view/19>.

¹⁰ S Suramin and I Ismaidar, "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 2024, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7757>.

negara dapat menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil dan tidak memihak untuk menentukan nasib politik mereka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah perubahan undang-undang pemilu diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selama proses pemilu. Melalui analisis isu-isu seperti integritas yang terganggu, keterlibatan politik yang rendah, dan ketidakpastian hukum, penelitian ini berusaha menunjukkan area-area di mana modifikasi hukum yang tepat dapat meningkatkan sistem pemilu. Penelitian ini akan mengkaji praktik-praktik terbaik untuk meningkatkan integritas, meningkatkan partisipasi, dan menegakkan supremasi hukum dalam proses pemilu, serta pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan reformasi hukum pemilu. Hal ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analitis dan perbandingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan kita secara signifikan mengenai pentingnya reformasi undang-undang pemilu untuk menegakkan integritas lembaga-lembaga politik di masa depan dan memperkuat demokrasi.

Metode Penelitian

Beberapa teknik akan diterapkan dalam penelitian ini untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh mengenai alasan-alasan perlunya reformasi undang-undang pemilu. Pada awalnya, survei literatur akan dilakukan untuk mengkaji penelitian terdahulu mengenai pemilu, legislasi pemilu, dan upaya-upaya reformasi hukum di negara-negara lain¹¹. Peneliti akan dapat memahami tren, hambatan, dan kemajuan dalam topik ini dengan bantuan evaluasi literatur ini, yang juga akan memberikan landasan teori yang kuat.

Selain itu, studi kasus akan digunakan untuk menyandingkan kerangka kerja pemilu di berbagai negara yang telah menerapkan modifikasi undang-undang pemilu. Melalui telaah terhadap berbagai strategi yang telah diterapkan di berbagai lingkungan politik, studi ini akan menilai pencapaian dan kekurangan dari inisiatif-inisiatif reformasi tersebut. Pemahaman mendalam mengenai dampak modifikasi legislatif terhadap integritas, partisipasi, dan kepastian hukum proses pemilu akan dapat diperoleh melalui studi kasus¹².

Terakhir, untuk mendapatkan wawasan praktis mengenai isu-isu yang dihadapi selama pemilu dan pendapat mereka mengenai perlunya perubahan undang-undang pemilu, wawancara dengan para pemilih, ahli hukum, dan praktisi pemilu akan dilakukan. Peneliti akan dapat mempelajari secara langsung perspektif mereka yang berpartisipasi dalam proses pemilu melalui wawancara ini, serta rekomendasi mereka untuk perbaikan yang mungkin dilakukan. Melalui penggunaan studi kasus, wawancara, dan tinjauan literatur, penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai perlunya reformasi legislatif.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Masalah dalam Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Proses Pemilu

Prosedur pemilu sering kali menghadapi masalah yang dapat membahayakan legitimasi, partisipasi, dan kepastian hukum. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, mari kita mengidentifikasi isu-isu utama dalam ketiga bidang ini:

Integritas Pemilu

Memastikan proses pemilu yang adil, jujur, dan transparan membutuhkan integritas pemilu. Meskipun demikian, menegakkan integritas pemilu merupakan tantangan di banyak

¹¹ Karen Bilsland and Sabina Siebert, "Walking Interviews in Organizational Research," *European Management Journal*, no. October 2022 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.emj.2023.04.008>.

¹² M K Alam, "A Systematic Qualitative Case Study: Questions, Data Collection, NVivo Analysis and Saturation," *Qualitative Research in Organizations and ...*, 2021, <https://doi.org/10.1108/QR0M-09-2019-1825>.

negara di seluruh dunia. Malpraktik terkait pemilu seperti kecurangan suara, manipulasi hasil, intimidasi pemilih, dan korupsi merupakan masalah yang umum terjadi. Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemilu dan pemerintah terpilih sering kali dilemahkan oleh ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum yang mengatur pemilu.

Partisipasi Politik

Rendahnya tingkat keterlibatan politik masyarakat dapat membahayakan demokrasi. Rendahnya jumlah pemilih dapat disebabkan oleh beberapa hal, termasuk ketidakpuasan terhadap sistem politik, ketidakpercayaan terhadap politisi atau partai politik, dan hambatan administratif atau fisik untuk memberikan suara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, berkurangnya rasa legitimasi terhadap pemerintahan yang terpilih, dan penggambaran yang keliru atas kehendak rakyat.

Kepastian Hukum

Memastikan kepastian hukum dalam proses pemilu sangat penting untuk menjaga kerangka kerja yang transparan dan konsisten bagi para pemilih, partai politik, dan lembaga-lembaga pemilu. Sayangnya, ketidakpastian hukum sering kali muncul akibat peraturan pemilu yang ambigu, interpretasi yang berbeda atas peraturan hukum, dan prosedur pemungutan suara yang tidak jelas. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik politik, sengketa pemilu, dan skeptisisme terhadap keakuratan hasil pemilu.

Implikasi Masalah Terhadap Demokrasi

Isu-isu yang berkaitan dengan integritas, partisipasi, dan ketaatan pada aturan hukum dalam proses pemilu memiliki konsekuensi substansial bagi vitalitas demokrasi. Mengorbankan integritas pemilu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi dan pemerintahan, sehingga menggoyahkan sistem politik. Partisipasi politik yang menurun menyebabkan cerminan yang kurang tepat dari keinginan rakyat, sehingga mengurangi kredibilitas badan pemerintahan. Ketidakjelasan hukum dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam proses pemungutan suara, melemahkan integritas pemilu, dan memicu konflik yang seharusnya dapat dihindari.

Penanggulangan Masalah

Inisiatif reformasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Meningkatkan integritas pemilu melibatkan penguatan lembaga pengawas pemilu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam sistem pemilu. Kedua, kita harus berusaha untuk meningkatkan keterlibatan politik dengan meningkatkan aksesibilitas pemungutan suara, meningkatkan pendidikan politik, dan mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam sistem politik. reformasi hukum pemilu harus dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum dengan menyempurnakan peraturan pemilu, memperjelas prosedur pemungutan suara, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.

Dengan menyelesaikan tantangan-tantangan ini secara menyeluruh, sistem pemungutan suara dapat ditingkatkan, kepercayaan publik dapat diperoleh kembali, dan demokrasi dapat diperkuat. Perubahan-perubahan ini akan membantu menjamin bahwa pemilu akan terus menjadi alat yang ampuh bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapat mereka dan membentuk arah masa depan negara mereka.

Evaluasi Reformasi yang Ada: Tinjauan terhadap Upaya Reformasi Hukum Pemilu di Beberapa Negara dan Dampaknya

Banyak negara yang berfokus untuk memperbaiki sistem pemilu mereka melalui reformasi undang-undang pemilu. Telaah terhadap inisiatif-inisiatif reformasi ini memberikan perspektif yang berharga mengenai berbagai strategi yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap integritas, keterlibatan, dan keandalan hukum sistem pemilu.

Kanada telah berhasil dalam reformasi hukum pemilu. Kanada menerapkan Undang-Undang Pemilu Kanada pada tahun 2000. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pemilihan umum, termasuk kampanye pemilihan umum, pendanaan politik, dan prosedur pemungutan suara. Reformasi ini diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemilu. Pengaruhnya termanifestasi dalam bentuk peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik dan hasil pemilu.

Reformasi undang-undang pemilu telah menjadi prioritas penting di negara-negara Eropa. Spanyol menerapkan Undang-Undang Pemilu pada tahun 2011 untuk meningkatkan representasi politik dan meningkatkan keterlibatan pemilih. Undang-undang ini mencakup beberapa modifikasi, seperti perubahan pada metode pemungutan suara dan distribusi kursi, serta langkah-langkah untuk mengurangi dampak sumber daya keuangan dalam politik. Dampaknya adalah peningkatan jumlah pemilih dan perluasan representasi politik.

Perubahan undang-undang pemilu telah menjadi topik diskusi yang menonjol di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa negara bagian telah menerapkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pemungutan suara, meminimalkan hambatan administratif, dan meningkatkan transparansi dalam pemilu. Dampak dari reformasi ini masih diperdebatkan, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai upaya untuk membatasi akses terhadap pemilih tertentu dan pihak lain menganggapnya sebagai langkah yang bermanfaat untuk meningkatkan demokrasi.

Negara-negara Afrika seperti Kenya telah menerapkan reformasi undang-undang pemilu untuk mengatasi tantangan integritas dan supremasi hukum. Kenya menerapkan undang-undang baru pada tahun 2017 yang sepenuhnya mengubah sistem pemilu negara tersebut. Undang-undang ini mencakup banyak modifikasi, seperti menerapkan peralatan pemungutan suara elektronik, menciptakan entitas pengawas pemilu yang otonom, dan meningkatkan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Dampaknya adalah meningkatnya integritas pemilu dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Meskipun terdapat banyak contoh perubahan undang-undang pemungutan suara yang efektif, masih ada hambatan yang harus diatasi. Beberapa negara menghadapi tantangan politik terhadap perubahan, sementara yang lain kesulitan mengimplementasikan reformasi karena keterbatasan sumber daya atau keterbatasan administratif. Menilai dampak jangka panjang dari reformasi undang-undang pemilu mungkin sulit dilakukan karena pengaruh eksogen seperti perubahan politik atau sosio-ekonomi.

Evaluasi reformasi undang-undang pemilu harus mempertimbangkan kondisi politik, sosial, dan budaya masing-masing negara. Penting untuk mengakui bahwa perubahan signifikan dalam proses pemilu membutuhkan waktu dan dedikasi yang berkelanjutan. Pengalaman dari beberapa negara menunjukkan bahwa reformasi undang-undang pemilu dapat sangat meningkatkan integritas, meningkatkan partisipasi, dan menegakkan supremasi hukum dalam prosedur pemilu, sehingga memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

Rekomendasi: Meningkatkan Integritas, Partisipasi, dan Kepastian Hukum dalam Hukum Pemilu

Untuk mengatasi isu-isu terkini dalam undang-undang pemilu dan meningkatkan integritas, partisipasi, dan kepastian hukum sistem pemungutan suara, beberapa usulan penting dapat dipertimbangkan:

Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu

Meningkatkan lembaga pengawas pemilu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Lembaga-lembaga tersebut harus diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengawasi proses pemilu secara menyeluruh, yang meliputi administrasi kampanye, pendanaan politik, dan pemungutan suara. Mereka harus memiliki tingkat otonomi yang

tinggi dan diberi sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efisien.

Perbaikan Aturan Pembiayaan Pemilu

Meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pembiayaan pemilu sangat penting. Langkah-langkah ini dapat berupa membatasi kontribusi politik dari perusahaan atau individu kaya, memberlakukan persyaratan pengungkapan keuangan yang ketat untuk kampanye politik, dan mengadvokasi transparansi dalam penanganan keuangan kampanye. Tujuan utamanya adalah untuk mengekang dampak yang tidak semestinya dari uang dalam politik dan menjaga proses demokrasi agar tidak terpengaruh oleh kepentingan finansial tertentu.

Peningkatan Aksesibilitas Pemungutan Suara

Memprioritaskan peningkatan aksesibilitas pemungutan suara untuk mendorong keterlibatan politik yang lebih luas. Hal ini mencakup penyediaan opsi pemungutan suara yang mudah diakses, seperti pemungutan suara lebih awal, pemungutan suara melalui pos, dan fasilitas pemungutan suara di tempat yang mudah dijangkau oleh semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas terbatas.

Pendidikan Politik yang Meningkatkan

Meningkatkan pendidikan politik dapat meningkatkan jumlah pemilih dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya sistem demokrasi. Inisiatif pendidikan politik harus diperluas di seluruh jenjang pendidikan, mencakup sekolah dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini mencakup inisiatif pendidikan publik yang luas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Modernisasi Teknologi Pemilu

Memanfaatkan teknologi dalam pemilu dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi proses demokrasi. Hal ini mencakup penggunaan metode pemungutan suara yang terkomputerisasi, pemeliharaan basis data pemilih, dan pengembangan aplikasi seluler untuk informasi pemilih. Langkah-langkah ini perlu diimbangi dengan perlindungan yang kuat untuk menjaga integritas dan keamanan pemilu dari serangan siber.

Penegakan Hukum yang Ketat

Menegakkan pelanggaran pemilu dengan tegas sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan pemilu. Hukuman berat, seperti pencabutan hak politik dan denda yang besar, harus dijatuhkan kepada individu yang melanggar peraturan pemilu. Tindakan ini akan menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemungutan suara.

Keterlibatan Masyarakat Sipil yang Lebih Aktif

Masyarakat sipil memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan memantau proses pemilu. Organisasi masyarakat sipil harus memiliki akses yang lebih luas untuk memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu, dan harus diberikan bantuan untuk melakukan pemantauan pemilu yang independen dan dapat dipercaya. Partisipasi aktif masyarakat sipil dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam prosedur pemungutan suara. Menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sistem pemungutan suara. Hal ini akan meningkatkan integritas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam proses pemilu, sehingga memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memupuk ikatan yang lebih kuat antara pemerintah dan warganya.

Kesimpulan

Kajian kami terhadap masalah-masalah pemilihan dan inisiatif reformasi hukum pemilu mengungkapkan bahwa proses pemilu di berbagai negara memiliki tantangan substansial yang berkaitan dengan integritas, partisipasi, dan ketaatan pada supremasi hukum. Korupsi, keterlibatan politik yang terbatas, dan ketidakjelasan hukum sering kali membahayakan kredibilitas dan keabsahan prosedur pemilu. Berbagai negara telah menerapkan langkah-langkah reformasi hukum pemilu, seperti meningkatkan struktur pengawasan pemilu, menyempurnakan peraturan pembiayaan pemilu, dan memperbarui peralatan pemungutan suara.

Reformasi undang-undang pemilu sangat penting untuk meningkatkan demokrasi dan menegakkan kepercayaan publik. Negara-negara dapat memastikan bahwa suara warga negara terwakili secara akurat dalam hasil pemilu dengan meningkatkan integritas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam proses pemilu. Reformasi hukum pemilu sangat penting untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya dengan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan menerapkan langkah-langkah reformasi yang kami usulkan, kami mengantisipasi bahwa sistem pemilu akan menjadi lebih adil, lebih inklusif, dan lebih dapat diandalkan. Hal ini akan memperkuat dasar-dasar demokrasi dan menjamin bahwa pemerintah yang terpilih secara akurat mencerminkan keinginan asli warganya. Negara-negara harus memprioritaskan reformasi undang-undang pemilu sebagai komponen penting dalam meningkatkan lembaga-lembaga politik agar dapat memenuhi kebutuhan dan ambisi warga negaranya dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M K. "A Systematic Qualitative Case Study: Questions, Data Collection, NVivo Analysis and Saturation." *Qualitative Research in Organizations and ...*, 2021. <https://doi.org/10.1108/QR0M-09-2019-1825>.
- Bilsland, Karen, and Sabina Siebert. "Walking Interviews in Organizational Research." *European Management Journal*, no. October 2022 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.emj.2023.04.008>.
- Habibi, A. "Pembatasan Peserta Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum." ... : *Indonesian Constitutional Law Journal*. scholar.archive.org, 2020. <https://scholar.archive.org/work/57hjoosrfvdwzjvzcizhbec4qu/access/wayback/http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/download/14549/pdf>.
- Kasih, O M, and I Triadi. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Partisipasi Politik Warga Negara Pada Pemilihan Umum Di Indonesia:(Enforcement of Human Rights in Public Political ...)" *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2024. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2369>.
- Mufidah, A, and A Syarofi. "HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)." ... *Republic: Journal of Constitutional Law*, 2024. <http://ejournal.insud.ac.id/index.php/HTN/article/view/868>.
- Pabbu, A, and I Irpan. "Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Palopo." *Alauddin Law Development Journal*, 2021. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/24053>.
- Patawari, P, and I Bidja. "Ketentuan Hukum Perbandingan Sistem Pengawasan Terhadap

- Anggota Lembaga Parlemen Dibeberapa Negara." *Kalabbirang Law Journal*, 2019. <https://sainsmat.org/index.php/kalabbirang/article/view/19>.
- Purba, L, M Selan, and I Mubarok. "Eksistensi Pusat Organisasi Kemasyarakatan (POK) Masyarakat Menyikapi Pemilu 2024." *Decisio: Law Journal*, 2024. <https://jurnallppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/article/view/7>.
- Saragih, J, P W Ningsih, M Latifah, and ... "Demokrasi Patronase Dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pilkada Sumut Oleh Mahasiswa PPKN Unimed." ... *Governance Journal*, 2024. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/1231>.
- Suramin, S, and I Ismaidar. "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 2024. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7757>.
- Yarsina, N, and I Irhamni. "EKSISTENSI FUNGSI DAN PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPD) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA." *Ensiklopedia of Journal*, 2024. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2187>.
- Yusuf, A, and H Hertanto. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024." *Journal Publicuho*, 2023. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/53341>.